



2018

LAPORAN KINERJA

BIRO KERJA SAMA

KATA PENGANTAR

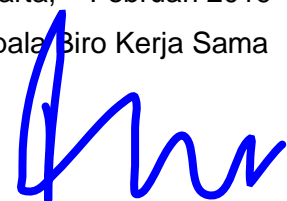


Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai salah satu Unit Organisasi di BPOM, Biro Kerja Sama Sekretariat Utama wajib menyelenggarakan SAKIP. Untuk itu Biro Kerja Sama Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai. Tahun 2018 ini adalah tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Biro Kerja Sama Sekretariat Utama Tahun 2015 – 2019.

Diharapkan Laporan Kinerja yang disajikan ini dapat menyajikan pencapaian sasaran strategis Renstra Biro Kerja Sama Sekretariat Utama dan dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Strategis Biro Kerja Sama Sekretariat Utama dapat tercapai secara optimal di akhir periode Renstra.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Biro Kerja Sama - Sekretariat Utama, BPOM di masa yang akan datang.

Jakarta, Februari 2019
Kepala Biro Kerja Sama



Diana ES Sutikno

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Daftar Lampiran	v
Ringkasan Eksekutif	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
Maksud dan Tujuan.....	2
Peran Biro Kerja Sama berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.....	2
Sumber Daya Manusia di Biro Kerja Sama.....	3
Potensi dan Permasalahan.....	4
Sistematika Penyajian Laporan Kinerja.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
Rencana Strategis	8
Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
Capaian Kinerja Organisasi	19
Analisa Capaian Kinerja	22
Akuntabilitas Keuangan	36
Analisis Efisiensi	38
BAB IV PENUTUP	39
Lampiran	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Pegawai Biro Kerja Sama Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Tabel 2	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2015-2017 (OTK Lama).	9
Tabel 3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK baru)	10
Tabel 4	Sasaran Program dan Alokasi Anggaran 2015 – 2019	11
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Biro Kerja Sama Tahun 2018 (SOTK Baru)	15
Tabel 6	Program Kegiatan Biro Kerja Sama Tahun 2018	16
Tabel 7	Pencapaian Sasaran Program Biro Kerja Sama Tahun 2018	19
Tabel 8	Pencapaian IKU Biro Kerja Sama Tahun 2018	20
Tabel 9	Pencapaian Sasaran Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	22
Tabel 10	Pencapaian Sasaran Pencapaian Sasaran Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	24
Tabel 11	Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kerja Sama BPOM	25
Tabel 12	Pencapaian Sasaran Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan	29
Tabel 13	Pencapaian Sasaran Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)	31
Tabel 14	Pencapaian Sasaran Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019	33
Tabel 15	Realisasi Anggaran Biro Kerja Sama tahun 2018	36
Tabel 16	Realisasi Anggaran Biro Kerja Sama Per Komponen tahun 2018	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Struktur Organisasi Biro Kerja Sama sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017.....	3
Gambar 2	Visi, Misi dan Tujuan Badan POM	8
Gambar 3	Peta Strategi BSC Level 0 Kepala BPOM RI	12
Gambar 4	Peta Strategi BSC Level 1 Sekretariat Utama	13
Gambar 5	Peta Strategi BSC Level 2 Biro Kerja Sama BPOM	13
Gambar 6	Peta Strategi Biro Kerja Sama Luar Negeri 2015 – 2019	14
Gambar 7	Capaian Presentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti secara efektif	26
Gambar 8	Capaian Presentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti secara efektif	28
Gambar 9	Jenis Kegiatan Perjalanan Dinas	30
Gambar 10	Penilaian AKIP Biro Kerja Sama 2015 – 2018	33
Gambar 11	Perbandingan Nilai AKIP Biro Kerja Sama 2017 dan 2018	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rencana Strategis Biro Kerja Sama Tahun 2015 – 2019	42
Lampiran 2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Kerja Sama	43
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Tahun 2018	48
Lampiran 4	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018	53
Lampiran 5	Pengukuran Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2018	54
Lampiran 5	Pengukuran Efektivitas Kinerja Sub Kegiatan Tahun 2018	59

RINGKASAN EKSEKUTIF

Biro Kerja Sama Badan POM sebagai salah satu unit kerja di Sekretariat Utama Badan POM memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan akuntabilitas kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Sekretaris Utama Badan POM, disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Biro Kerja Sama dan upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Untuk mencapai tujuan Biro Kerja Sama 2015-2019, telah ditetapkan 2 (dua) Sasaran Program yaitu: 1) Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama sesuai Renstra tercapai dengan nilai 78,35 dengan kategori memuaskan (104%); 2) Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional tercapai dengan kategori Baik (100%); 3) Meningkatnya Kerja Sama BPOM tercapai dengan kategori Baik (100%); 4) Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan dengan kategori memuaskan (105,26); 5) Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST) tercapai dengan kategori Baik (100%); 6) Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019 tercapai dengan kategori baik (93,05%).

Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja Biro Kerja Sama, 2 (dua) Indikator Kinerja telah melampaui target di tahun 2018 dengan kategori pencapaian Memuaskan, yaitu 1) Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan 2) Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan (105,26). Sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja telah mencapai target baik di tahun 2018 yaitu 1) Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional tercapai; 2) Meningkatnya Kerja Sama BPOM; 3) Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST). Disamping itu 1 (satu) indikator kinerja tercapai dengan kategori cukup karena capaiannya 93,05%; yaitu indikator "Nilai AKIP Biro Kerja Sama".

Pada tahun 2018, pagu anggaran Biro Kerja Sama Sekretariat Utama sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2018 adalah Rp7.225.000.000,- (tujuh miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh rupiah). Kemudian pada bulan Agustus 2018 Biro Kerja Sama Sekretariat Utama memperoleh tambahan anggaran dari Satuan Kerja lain untuk tambahan dalam rangka pencapaian Kerja Sama Dalam Negeri sehingga total anggaran Biro Kerja Sama menjadi Rp8.225.000.000,- (delapan miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh rupiah). Dari total anggaran, terealisasi sebesar Rp8.225.000.000,- (delapan miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh rupiah) dari total pagu. Alokasi anggaran terbesar adalah untuk melakukan perjalanan dinas luar negeri.

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Biro Kerja Sama Sekretariat Utama harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain: 1. Peningkatan jumlah dan kualitas SDM serta memberikan *reward* dan *punishment* terhadap pegawai, serta dilakukan intensifikasi pembinaan terhadap pegawai. 2. Dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai bahan masukan perencanaan, usulan kebutuhan SDM, maupun kaji ulang bisnis proses dan struktur organisasi. 4. Perencanaan penyusunan regulasi yang mampu mengantisipasi dinamika lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan. 6. Peningkatan koordinasi penyiapan bahan kunjungan kerja luar negeri dan dokumen posisi BPOM/Indonesia dalam forum bilateral, regional dan multilateral.

BAB I PENDAHULUAN

Tahun 2018 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) melaksanakan 5 (lima) dari 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan Nawacita terutama agenda ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat melalui Pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai acuan untuk melaksanakan program prioritas tersebut, Badan POM telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) periode 2015-2019 yang dijabarkan lebih lanjut pada Renstra Eselon I dan Renstra unit kerja.

Sejalan dengan perubahan organisasi guna menjawab tantangan dan memberikan dukungan bagi Pembangunan Nasional Periode 2015-2019, BPOM RI telah melakukan revisi Renstra sesuai dengan amanat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawasan Obat dan Makanan yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan OTK baru, Biro Kerja Sama Luar Negeri berganti nama menjadi Biro Kerja Sama dengan ruang lingkup kerja sama luar negeri dan kerja sama dalam negeri.

Biro Kerja Sama sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya menyusun perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Biro Kerja Sama untuk periode 2015-2019. Renstra Biro Kerja Sama mempunyai nilai strategis dalam memberikan arah dan kebijakan kelembagaan baik organisasi, SDM dan Manajemen dalam rangka mendukung pencapaian pengembangan dan efektivitas jejaring kerja sama.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Renstra, Biro Kerja Sama dituntut menerapkan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja. Laporan Kinerja memuat penjelasan atas pencapaian setiap sasaran strategis yang ditetapkan dalam renstra dan perjanjian kinerja termasuk aspek keuangan yang mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang digunakan dengan hasil dan manfaat yang diperoleh. Laporan kinerja Biro Kerja Sama Tahun 2018 dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan

pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, dan penyempurnaan kebijakan yang diperlukan. Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Tahun 2018 juga dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kemajuan kinerja Biro Kerja Sama.

1.1. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2018 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.

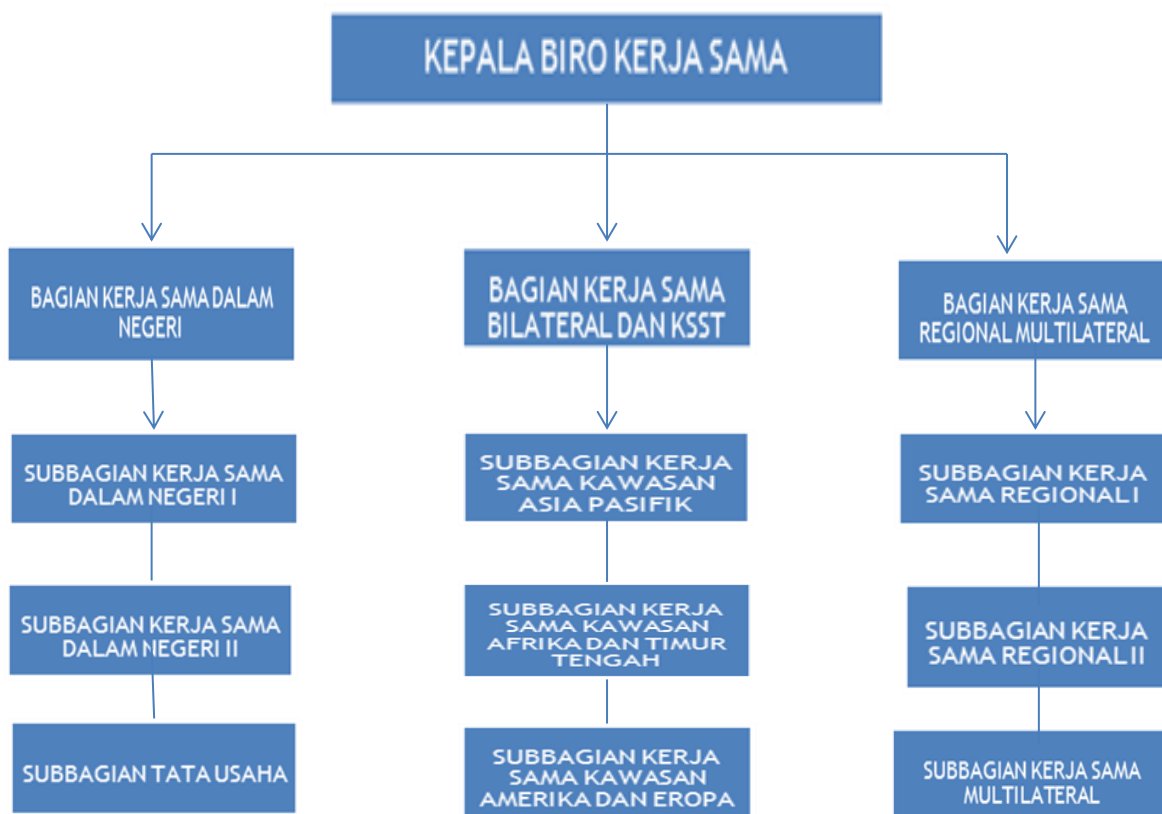
Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Biro Kerja Sama selama tahun 2018. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya.

1.2. Peran Biro Kerja Sama berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017, Biro Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Guna mendukung tugas tersebut, Biro Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatanselatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Biro Kerja Sama sebagai unit organisasi yang strategis. Biro Kerja Sama senantiasa menjalankan tugasnya secara lebih profesional dan pro-aktif, sesuai dengan kewenangan dan tugas-nya sebagai koordinator dan fasilitator kerja sama BPOM. Biro Kerja Sama dituntut memberikan dukungan manajemen dan mendorong kerja sama strategis sejalan dengan Renstra BPOM yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dan daya saing bangsa.



Gambar 1. Struktur Organisasi Biro Kerja Sama sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017

1.3. Sumber Daya Manusia di Biro Kerja Sama.

Data per 31 Desember 2018, jumlah pegawai Biro Kerja Sama Badan POM seluruhnya adalah 27 (dua puluh tujuh) orang, jumlah tersebut terdiri dari 15 (lima belas) orang ASN dan staf pramubakti yang berjumlah 12 (dua belas) orang. Jabatan struktural di Biro Kerja Sama terdiri dari 1 (satu) Kepala Biro Kerja Sama, 3 (tiga) Kepala Bagian, 9 (sembilan) Kepala Sub Bagian.

Jumlah pegawai Biro Kerja Sama berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada tabel 1. di bawah ini:

Tabel 1. Pegawai Biro Kerja Sama Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang Pendidikan	ASN		Pramubakti	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
S3	0	0	0	0
S2	8	53,3%	0	0
S1	5	33,3%	10	83,3%
D3,D4 dan sarjana Muda	0	0	1	8,3%
D1 Kebawah	2	13,3%	1	8,3%
Total	15	100%	12	100%

1.4.Potensi dan Permasalahan

Globalisasi merupakan perubahan interaksi manusia secara luas yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi, dan transportasi yang sangat cepat. Dampak tersebut mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional, khususnya kerjasama di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (*Free Trade Area/FTA*) baik kerjasama bilateral, regional, maupun multilateral. FTA membuka peluang perdagangan obat dan makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapat risiko beredarnya obat ilegal maupun pangan mengandung bahan berbahaya. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan ekonomi dan kesehatan.

Dampak globalisasi pada pembangunan ekonomi, dapat membuka peluang yang memungkinkan sejumlah produk obat dan makanan Indonesia lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang bergabung dalam perjanjian FTA. Hal ini juga membuka peluang bagi produk obat dan makanan negara anggota FTA untuk masuk ke Indonesia. Masuknya produk perdagangan bebas tersebut, merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar bagi produk obat dan makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Perdagangan bebas juga membawa dampak pada penurunan derajat kesehatan yang dipicu dengan oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat

tanpa diimbangi dengan pengetahuan dan kesadaran akan kesehatan. Untuk itu, masyarakat perlu proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi obat dan makanan tersebut.

Badan POM menyadari dalam pengawasan obat dan makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu Badan POM perlu mengembangkan kerja sama dengan stakeholder baik dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2018, Badan POM telah berperan aktif dalam Kerja Sama Bilateral dan KSST yang meliputi 14 (empat belas) negara yaitu: Amerika Serikat, Australia, Cina, India, Korea, Arab Saudi, Jepang, Ukraina, Kazakhstan, EFTA, Palestina, Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL), Maroko dan Tunisia dengan 14 (empat belas) instansi yaitu US Food and Drug Administration (FDA), US Pharmacopeia, Harvard Kennedy School (HKS), Michigan State University (MSU), Massachusetts Institute of Technology (MIT), Therapeutic Good Administration (TGA), General Administration of Custom of the PRC, State Administration of Traditional Chinese Medicine (SATCM), Guangzhou Hospital of Traditional Chinese Medicine (TCM), Food and Health Bureau of Hong Kong Special Administrative Region, Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO), Ministry of AYUSH, Ministry Food and Drug Safety (MFDS), Saudi Food and Drug Administration (SFDA), Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA), Japan International Cooperation Agency (JICA), State Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control (SSUMDC), National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment (NCEMMDME)

Dalam kerja sama regional multilateral, Badan POM berperan aktif di 20 (dua puluh) forum yang meliputi SEOM, Cluster 4, ACCSQ TMHS PWG, ACCSQ PFPWG, ACCSQ PPWG, ASEAN – China, ASEAN - Australia New Zealand, ASEAN – Korea, APEC, RCEP, CND, MSM SSFFC, CODEX, ICMRA, ICDRA, TBT WTO, SPS WTO, TRIPS WTO, WTO TFA, OKI dan FAO.

Kerja Sama Dalam Negeri yang telah menghasilkan sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kerja sama yang meliputi penandatanganan MoU oleh pihak Pemerintah maupun Non Pemerintah yang akan melakukan kerja sama dengan Badan POM.

Jejaring kerja sama ini perlu penguatan karena karena belum semuanya berjalan efektif. Tantangan ke depan, Badan POM harus membuat terobosan untuk memperkuat kemitraan dengan stakeholder terkait dalam pengawasan obat dan makanan.

Berkaitan dengan tugas-tugas yang secara langsung ditangani oleh Biro Kerja Sama terdapat potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam menyelenggarakan koordinasi kerja sama luar negeri antara lain:

- a. Hubungan dan kerja sama bilateral, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan European Union mengusulkan konsep *free trade agreement* dalam bentuk *Framework Agreement Trade and Investment Council (TIC)* dan *Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)*. Pendekatan lain yang dilakukan adalah Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dengan negara-negara berkembang.
- b. Hubungan dan kerja sama regional, mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dan perjanjian *Free Trade Area ASEAN+1 FTA (AC-FTA, AJCEP, AANZ-FTA, AI-FTA, AK-FTA)*, serta perintisan perluasan kerjasama ASEAN dengan 6 mitra *partner ASEAN (China, Jepang, Korea, Australia, New Zealand dan India)* dalam forum RCEP menjadi satu forum tunggal yang akan berisi 16 negara.
- c. Hubungan dan kerja sama multilateral/organisasi internasional, konsep *free trade* dalam WTO.

Konsep kawasan bebas perdagangan yang diusulkan oleh negara-negara tersebut bertujuan untuk meningkatkan daya saing ekonomi negara masing-masing dan juga kawasan regional terkait. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan jasa serta memungkinkan sejumlah produk obat dan makanan Indonesia akan lebih mudah memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian pasar bilateral, regional maupun multilateral tersebut begitu juga sebaliknya. Untuk itu, Badan POM di masa yang akan datang tidak hanya menghadapi tantangan dalam pengawasan obat dan makanan di kawasan Indonesia, namun juga mempunyai tantangan dalam meningkatkan daya saing industri farmasi, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan dan makanan dalam negeri agar mampu bersaing di pasar Indonesia maupun pasar internasional.

Kerja Sama Dalam Negeri BPOM diarahkan untuk pengembangan efektivitas jejaring kerja sama pengawasan obat dan makanan nasional yang meliputi kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Akademisi, Asosiasi Pelaku Usaha, Asosiasi Profesi dan Media. Sebagai implementasi dari Inpres Nomor 3 Tahun 2017, sejak tahun 2017, BPOM telah menandatangani lebih dari 100 Perjanjian Kerja Sama, termasuk Nota Kesepahaman (MoU) di berbagai bidang antara lain: peningkatan pengawasan obat dan

makanan, penguatan kelembagaan BPOM, peningkatan kapasitas SDM, serta program komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan program pembangunan, diperlukan kerja sama sinergis antara pemerintah dan pelaku usaha. Hal ini dapat diwujudkan dengan memanfaatkan program CSR yang telah diatur pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Untuk menjaga akuntabilitas dan mencegah terjadinya benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BPOM, kerja sama yang melibatkan pelaku usaha harus mempunyai arahan yang jelas. Untuk itu pada tahun 2018, Biro Kerja Sama telah melakukan penyusunan Pedoman CSR sebagai panduan bagi pelaku usaha dan BPOM dalam melaksanakan kegiatan bersama.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.
- 2) Bab II Perencanaan Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi perencanaan strategis Biro Kerja Sama 2015-2019 dan penetapan kinerja tahun 2018.
- 3) Bab III Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini dibagi per subbab yang berisi hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Laporan Kinerja tahun 2018.
- 4) Bab IV Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja dan rekomendasi perbaikan ke depan untuk meningkatkan kinerja.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 memberikan amanat bahwa pembangunan kesehatan dan gizi bangsa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan gizi masyarakat pada seluruh siklus kehidupan baik pada tingkat individu, keluarga maupun masyarakat. Salah satu upaya dalam pembangunan kesehatan dan gizi tersebut, perlu dilakukan peningkatan pengawasan obat dan makanan. Hal tersebut dituangkan dalam Visi dan Misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan POM cq. Biro Kerja Sama. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan strategis (*strategic goals*) Badan POM. Rencana pencapaian tujuan strategis Badan POM lebih lanjut dituangkan dalam rencana strategis (Renstra).

VISI	MISI	TUJUAN
<ul style="list-style-type: none">•Obat dan Makanan Aman, Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa	<ul style="list-style-type: none">•Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;•Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan;•Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan POM	<ul style="list-style-type: none">•Meningkatkan jaminan produk Obat dan Makanan aman•Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal, dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi

Gambar 2. Visi, Misi dan Tujuan Badan POM

Tahun 2018 merupakan tahun transisi bagi organisasi dan tata kerja BPOM setelah ditetapkannya Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 dan Peraturan BPOM No. 26 Tahun 2017. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 Tahun 2014, adanya perubahan struktur organisasi dan/atau tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga (K/L) akan berdampak pada perubahan rencana strategis K/L tersebut. Untuk itu Biro Kerja Sama telah melakukan revisi terhadap Rencana Strategis Biro Kerja Sama tahun 2015-2019 dengan

mengacu Rencana Strategis BPOM 2015-2019 Rencana Strategis Sekretariat Utama, terutama pada sasaran program, indikator, dan target kinerja.

Biro Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai dukungan manajemen pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerja sama BPOM guna mencapai visi, misi dan tujuan BPOM.

Biro Kerja Sama sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kerja sama di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, guna mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2015-2019 yaitu:

“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”

Diharapkan Biro Kerja Sama dapat memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas dan fungsinya bagi keberhasilan pelaksanaan Renstra BPOM 2015-2019.

Perubahan struktur organisasi sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Biro Kerja Sama menetapkan 6 (enam) sasaran program dengan 8 (delapan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan sasaran program, indikator dan target kinerja BPOM tergambar dalam table 2 dan tabel 3.

Tabel 2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 2015-2017 (OTK Lama)

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target		
		2015	2016	2017
Meningkatnya efektivitas kerja sama luar negeri BPOM	Jumlah Kerja sama yang Efektif	25 kerja sama efektif	28 kerja sama efektif	31 kerja sama efektif
Meningkatnya koordinasi kerja sama dan kemitraan di bidang pengawasan obat dan makanan	Jumlah pengembangan kerja sama dan atau kerja sama internasional di bidang obat dan makanan	25 dokumen kerja sama	28 dokumen kerja sama	31 dokumen kerja sama
Meningkatkan pelaksanaan sosialisasi kepada stakeholder terkait kerja sama Internasional dibidang Obat dan Makanan	Jumlah kegiatan sosialisasi /publikasi/workshop	15 sosialisasi /publikasi/ workshop	15 sosialisasi /publikasi/ workshop	15 sosialisasi /publikasi/ workshop

Meningkatkan partisipasi aktif dalam kerja sama Internasional terkait obat dan makanan	Jumlah dokumen / kertas posisi	23 posisi	25 posisi	28 posisi
	Jumlah partisipasi aktif dalam pertemuan internasional	21 pertemuan	23 pertemuan	25 pertemuan
Meningkatkan kajian kerja sama di bidang Obat dan Makanan	Jumlah kajian	4 kajian	7 kajian	7 kajian
Meningkatkan kualitas pelayanan dokumen perjalanan dinas LN	Persentase dok perjalanan luar negeri yang selesai tepat waktu	95 %	95 %	95 %
Meningkatkan pengelolaan Human Capital Management (HCM) di Biro Kerja Sama	% ASN yang memiliki kinerja berkriteria baik	80 %	80 %	80 %
	% ASN yang mengikuti pelatihan	100 %	100 %	100 %
Implementasi QMS di Biro Kerja Sama	Perolehan sertifikasi ISO 9001	1 Sertifikat	1 Sertifikat	1 Sertifikat
Meningkatkan akuntabilitas Biro Kerja Sama	Nilai SAKIP dari BPOM	80	80	80

Tabel 3. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2018-2019 (OTK baru)

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	60	61
Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori Badan POM	1	1
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	95 %	95 %
	Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Meningkatnya Kerja Sama BPOM	Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	91	91
	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	70 %	71 %
Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	3	3
Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	78	78

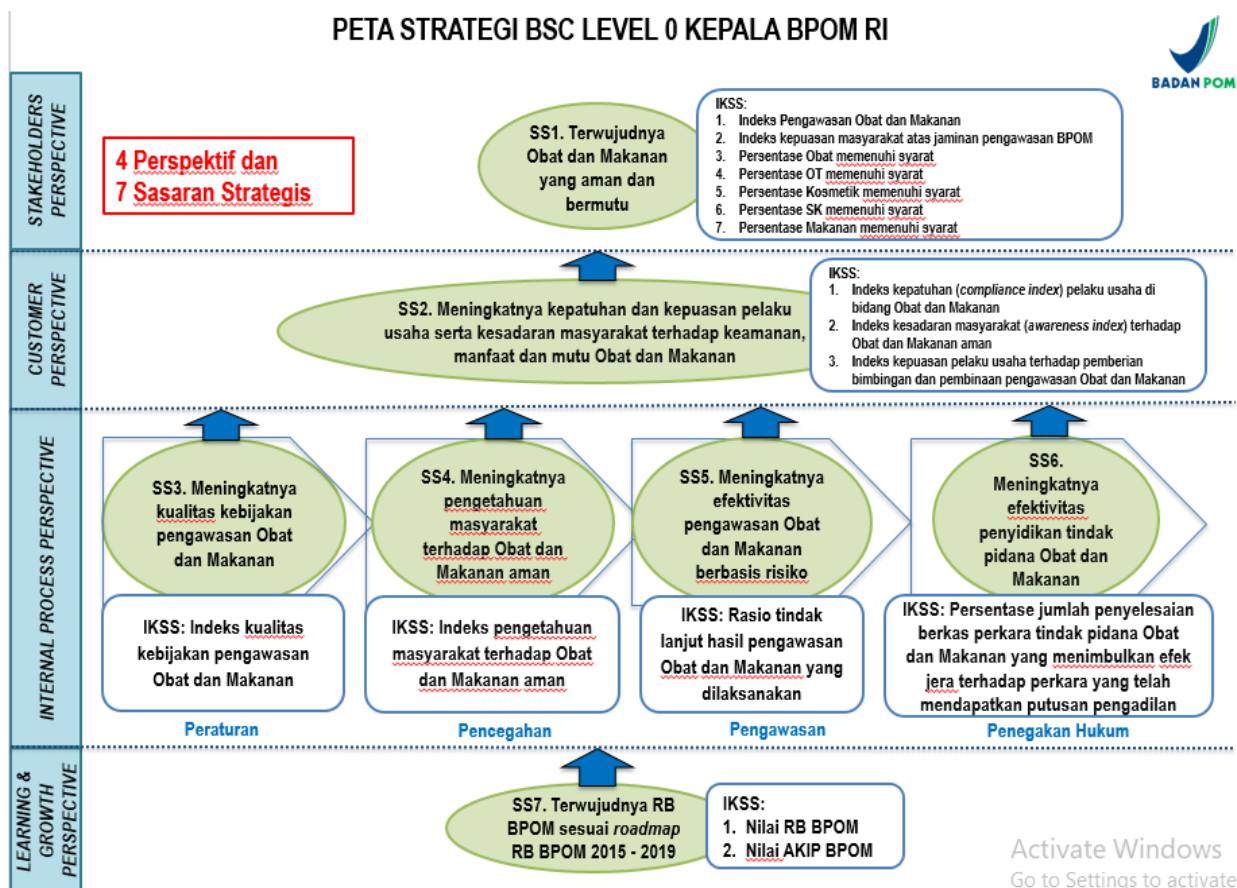
Tabel 2. berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Biro Kerja Sama tahun 2015-2017 berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/SK/BPOM Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004. Sedangkan tabel 3. berisi sasaran program, indikator, dan target kinerja Biro Kerja Sama Tahun 2018-2019 berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang baru yaitu mengacu Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran program Biro Kerja Sama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

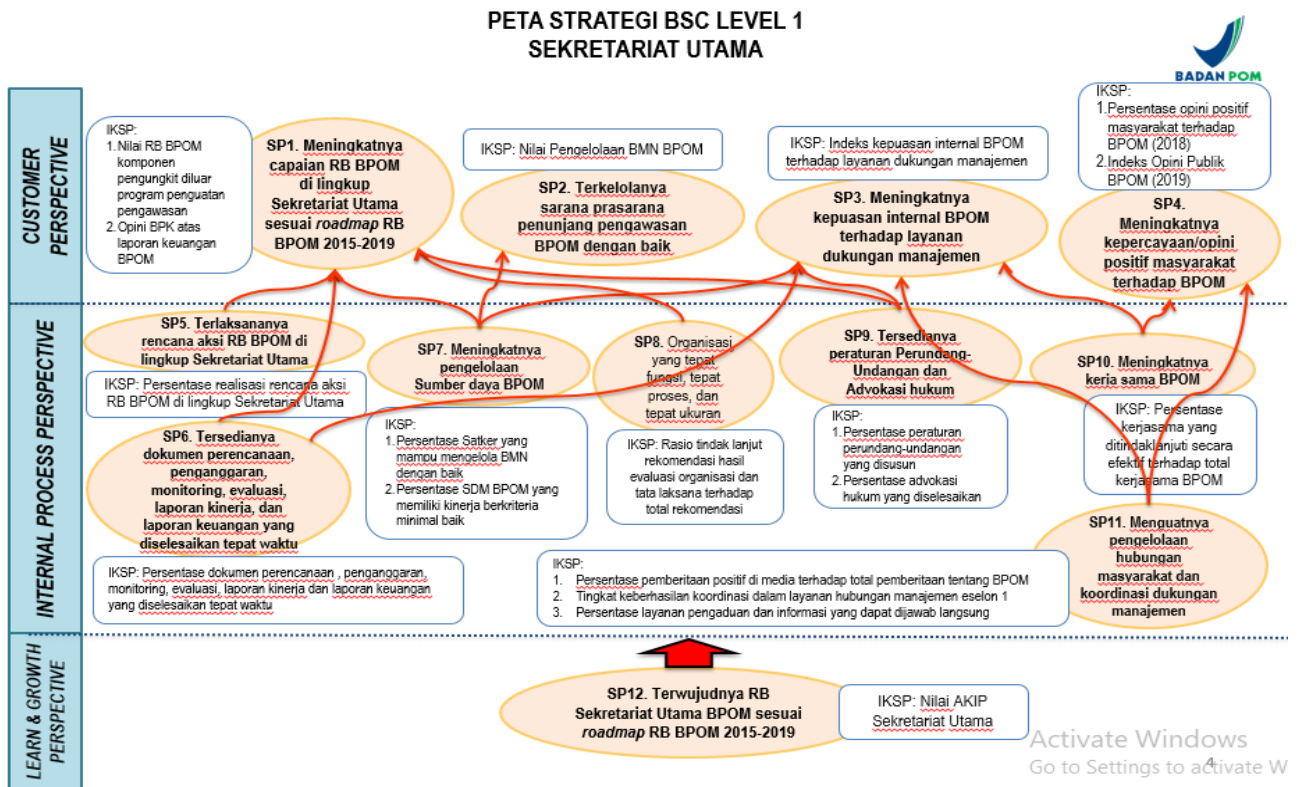
Tabel 4. Sasaran Program dan Alokasi Anggaran 2015 - 2019

Sasaran Program	Alokasi (Rp Milyar)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Program pengembangan kerja sama dan/kerja sama dalam dan luar negeri di bidang obat dan makanan	5,6	6	7	8,225	8,025
Program penguatan fungsi regulatori pengawasan obat dan makanan di negara selatan-selatan	-	-	-	1	1

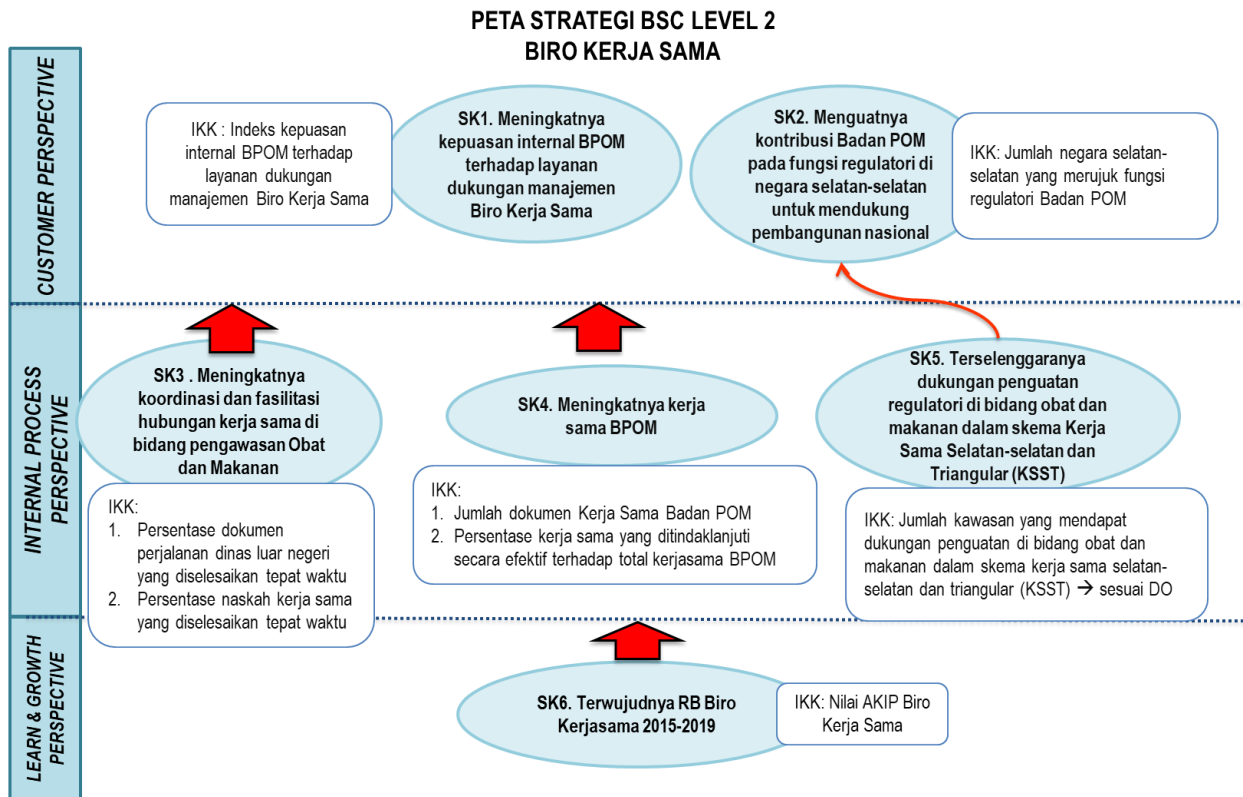
Sasaran kegiatan Biro Kerja Sama disusun berdasarkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis BPOM RI dan Sekretariat Utama. Sasaran Kegiatan Biro Kerja Sama ditujukan untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPOM dan Sekretariat Utama, sebagaimana tergambar pada peta strategi BPOM dan Sekretariat Utama berikut: yang menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:



Gambar 3. Peta Strategi BSC Level 0 Kepala BPOM RI

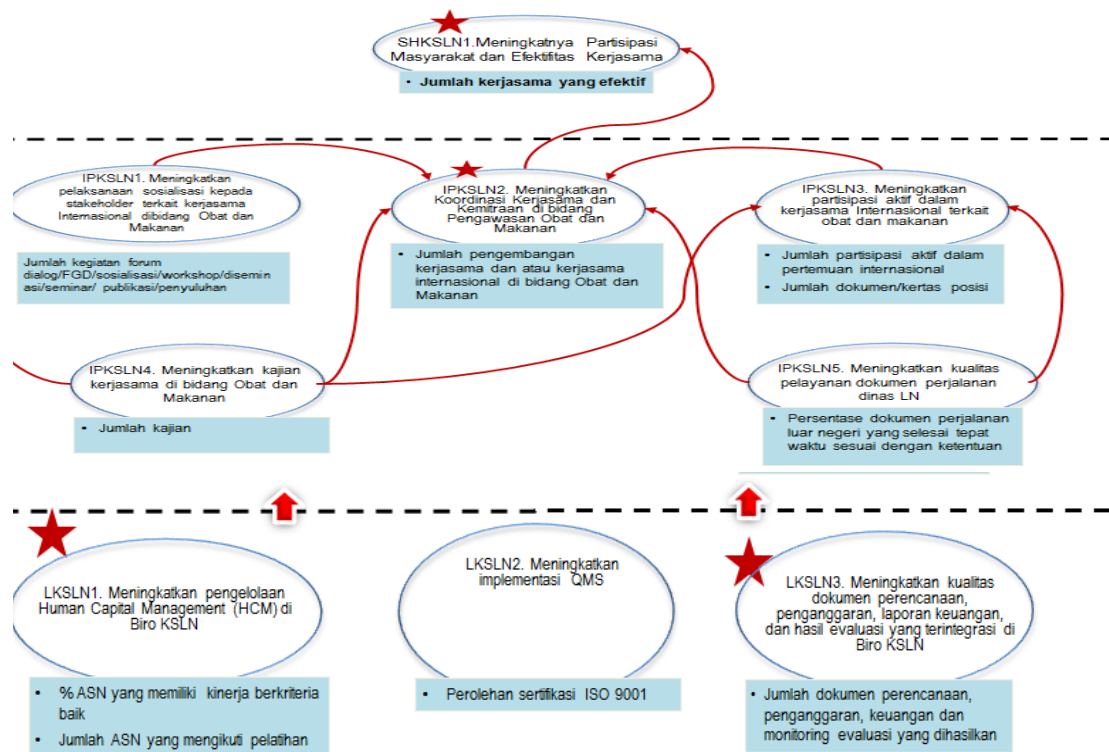


Gambar 4. Peta Strategi BSC Level 1 Sekretariat Utama



Gambar 5. Peta Strategi BSC Level 2 Biro Kerja Sama BPOM RI

PETA STRATEGI BIRO KERJA SAMA LUAR NEGERI 2015-2019



Gambar 6. Peta Strategi Biro Kerja Sama Luar Negeri 2015 - 2019

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan perjanjian kinerja antara lain adalah sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan *punishment* atau sanksi.

Tabel 5. Perjanjian Kinerja Biro Kerja Sama Tahun 2018 (SOTK Baru)

Sasaran strategis/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran
Meningkatnya Kerja Sama BPOM	Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	91 dokumen kerja sama	
	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	70%	
Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	3 kawasan	Rp 8.225.900.000,-

Perjanjian kinerja Biro Kerjasama Luar Negeri Tahun 2018, merupakan perjanjian Kepala Biro Kerja Sama dengan Sekretaris Utama (Lampiran 1) dengan indikator utama adalah (a) Jumlah Dokumen Kerja Sama BPOM, (b) Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM dan (c) Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan. Sesuai dengan dokumen rencana kerja pemerintah (RKP), definisi operasional untuk indikator utama adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah dokumen kerja sama berupa kajian kerja sama, dokumen kertas posisi, perjanjian kerja sama seperti Nota Kesepahaman (MoU), *Letter of Intent* (LoI), *Record of Discussion* (RoD), dll. Biro Kerja Sama Badan POM memiliki tugas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kerja sama meliputi peninjauan kerja sama, penyusunan kesepakatan kerja sama, pelaksanaan kerja sama di bidang obat dan makanan dengan mitra baik dalam negeri (K/L terkait, akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi pelaku usaha, dll) dan luar negeri baik dalam kerja sama bilateral, regional, dan multilateral
- b. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM: Presentase kerja sama dalam negeri, bilateral, regional, dan multilateral

termasuk hibah, yang dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh unit kerja di Badan POM, yang difasilitasi dan dikoordinasikan oleh Biro Kerja Sama dibandingkan dengan jumlah kerja sama Badan POM di bidang obat dan makanan. Yang dimaksud efektif adalah kerja sama yang telah diimplementasikan minimal 1 ruang lingkup. Biro Kerja Sama Badan POM memiliki tugas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kerja sama meliputi peninjauan kerja sama, penyusunan kesepakatan kerja sama, pelaksanaan kerja sama di bidang obat dan makanan dengan mitra baik dalam negeri (K/L terkait, akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi pelaku usaha, dll) dan luar negeri baik dalam kerja sama bilateral, regional, dan multilateral.

- a. Jumlah Dokumen pelaksanaan kerja sama selatan-selatan dalam bentuk workshop, training, seminar atau kegiatan capacity building lainnya yang melibatkan negara-negara di kawasan selatan-selatan. Biro Kerja Sama Badan POM memiliki tugas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kerja sama selatan-selatan meliputi kerja sama dalam bentuk workshop, training, seminar atau kegiatan capacity building lainnya yang melibatkan negara-negara di kawasan selatan-selatan.

Untuk mewujudkan kinerja tersebut dan berdasarkan peta strategi Biro Kerja Sama Negeri, dirancang kegiatan seperti pada Tabel 6.

Tabel 6. Program Kegiatan Biro Kerja Sama Tahun 2018

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	75	1. Operasional Biro Kerja Sama
Meningkatnya Kerja Sama BPOM	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	70%	2. Peninjauan Kerjasama dengan Mitra di Luar Negeri 3. Penyusunan Kajian Kerjasama Bilateral 4. Penyusunan Posisi Badan POM dalam Kerjasama Bilateral

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan
	Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	91 Dokumen kerja sama	<ol style="list-style-type: none"> 5. Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerjasama Bilateral dan Multilateral 6. Penyusunan Posisi Badan POM dalam Kerjasama Regional 7. Penyusunan Kajian Kerjasama Regional 8. Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerjasama Regional 9. Drug and Food Control Newsletter 10. Dukungan Pertemuan Head of NDRA Negara OKI 11. Penyusunan Kajian Kerja Sama Dalam Negeri 12. Pedoman/Roadmap Kerja Sama Badan POM 13. Workshop Strategi Penyusunan MoU Dalam Negeri
Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM	Min 1 negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kick off meeting dlm rangka KSS 2. Workshop dlm rangka Capacity Building untuk Timor Leste 3. Workshop Peningkatan Kapasitas Regulatori Palestina 4. Workshop Peningkatan Kapasitas Regulatori di negara berkembang di Kawasan
Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	3 kawasan	
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	95 %	Operasional Biro Kerja Sama
	Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	80%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri 2. Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional di Dalam dan Luar Negeri 3. Koordinasi Lintas Sektor dlm rangka Monitoring dan Evaluasi MoU Dalam Negeri
Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	78	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kompetensi Biro Kerja Sama

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Program/ Kegiatan
			2. Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Biro Kerja Sama 3. Pengadaan Fasilitas Perkantoran 4. Alat Pengolah Data Biro Kerjasama Luar Negeri

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Tahun 2018 merupakan tahun pertama Biro Kerja Sama dalam konteks organisasi dan tata kerja baru berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 26 Tahun 2017. Sesuai dengan OTK baru ini, terdapat penambahan tugas dan fungsi kerja sama dalam negeri sehingga terdapat perubahan sasaran program dan kegiatan. Evaluasi program dan kegiatan ditujukan sebagai referensi/acuan dalam perbaikan perencanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan pada 6 (enam) sasaran program dengan 8 (delapan) indikator yang telah dijabarkan seperti pada BAB II. Pencapaian Sasaran Program Biro Kerja Sama Tahun 2018 seperti pada table 7 berikut:

Tabel 7. Pencapaian Sasaran Program Biro Kerja Sama Tahun 2018

Prespective/Sasaran Sasaran Program	Indikator Kinerja	NPS	Kriteria
A. Customer Perspective		102,24	Memuaskan
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	104.47 %	Memuaskan
Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM	100	Baik
B. Internal Process Perspective		101,26 %	Memuaskan
Meningkatnya Kerja Sama BPOM	Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	100 %	Baik
	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	100,47 %	Baik
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	105 %	Memuaskan

Prespective/Sasaran Sasaran Program	Indikator Kinerja	NPS	Kriteria
pengawasan Obat dan Makanan	Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	100,87 %	Memuaskan
Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	100%	Baik
C. Learning Growth Perspective		93.05 %	Cukup
Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	93.05 %	Cukup

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) tahun 2018 sebesar 10,2 (Memuaskan) terbentuk dari agregasi realisasi kinerja indikator-indikator turunannya atau pembentukannya dibandingkan terhadap angka target dalam satu tahun. Secara rinci capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) di masing-masing sasaran program Biro Kerja Sama Tahun 2018 seperti pada table berikut:

Tabel 8. Pencapaian IKU Biro Kerja Sama Tahun 2018

Prespective/Sasaran Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kriteria	Capaian (%)
A. Customer Perspective					
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	-	75	78,35	104,47
Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM	jumlah	1	1	100%

Prespective/Sasaran Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Kriteria	Capaian (%)
B. Internal Process Perspective					
Meningkatnya Kerja Sama BPOM	Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	Jumlah	91	91	100%
	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM				
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	presentase	95 %	100 %	105,26
	Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	presentase	80 %	80,7 %	100,88
Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	dokumen	3	3	100
C. Learning Growth Perspective					
Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	nilai	78	72,58	93,05

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Sasaran 1	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama
IKU: Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 9. Pencapaian Sasaran Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama

No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	75	80	78,35	104,47	97,93									

Indikator kinerja yang pertama Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama adalah 78,35 dari target 75, sehingga capaian indikator adalah 104,47 %.

Indikator Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama ini baru diukur pada Tahun 2018 ini. Indikator ini merupakan pengukuran tingkat kepuasan seluruh unit kerja di BPOM yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat unit kerja BPOM terhadap layanan Biro Kerja Sama. Indeks kepuasan internal ini dihitung berdasarkan survei kepuasan SDM BPOM terhadap layanan dukungan manajemen yang dinilai dari nilai dan kepuasan internal terhadap layanan Biro Kerja Sama, antara lain:

1. Penyusunan naskah kesepakatan bersama (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) BPOM dengan lintas sektor di dalam negeri,
2. Penyiapan bahan kerja sama dengan pihak mitra luar negeri secara bilateral, maupun dalam forum regional dan multilateral,
3. Penyelesaian persetujuan dan *exit permit* perjalanan dinas luar negeri dari Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Luar Negeri.

Capaian indikator Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama melebihi target yang ditetapkan yaitu 104,47 dengan kategori Memuaskan.

Kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama Tahun 2018 antara lain:

- a. Penyusunan SOP Makro POM-13.01/CFM.01/SOP.01 tentang Penyusunan Perjanjian Kerja Sama, POM-13.01/CFM.01/SOP.02 tentang Pengembangan Jejaring Kerja Sama Dalam dan Luar Negeri, POM-13.01/CFM.01/SOP.03 tentang Penyiapan Kertas Posisi, dan POM-13.01/CFM.01/SOP.04 tentang Fasilitas Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- b. Pengembangan aplikasi sistem informasi *database* MoU/Perjanjian Kerja Sama BPOM berbasis website pada tautan kerja sama.pom.go.id. Aplikasi ini ditujukan untuk memudahkan unit kerja mendapatkan akses informasi kerja sama yang dimiliki oleh BPOM.
- c. Biro Kerja Sama telah memiliki unit eselon 3 yang mempunyai tugas dan fungsi pengelolaan Kerja Sama Selatan – Selatan (KSS).
- d. Peningkatan koordinasi Biro Kerja Sama melalui rapat koordinasi, komunikasi melalui telepon, e-mail dan *whatsapp group*.
- e. Peningkatan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka penyiapan bahan kunjungan kerja Kepala BPOM ke luar negeri.

Upaya Biro Kerja Sama untuk meningkatkan kepuasan internal dalam dukungan manajemen Biro Kerja Sama tahun 2019 terhadap keberhasilan pencapaian indikator dilakukan melalui:

1. Pengintegrasian sistem informasi kerja sama BPOM pada BPOM *Command Center* (BCC) dan menjadi salah satu *subsite* dari *website* BPOM.
2. Sosialisasi terkait tata cara perjalanan dinas luar negeri dan pengajuan persetujuan serta *exit permit* ke luar negeri.
3. Penyusunan pedoman dan roadmap kerja sama BPOM
4. Penyusunan panduan penyiapan bahan kerja sama luar negeri BPOM

Sasaran 2	Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional
IKU: Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori di BPOM	

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 1 (satu) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 10. Pencapaian Sasaran Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional

No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk pada fungsi regulatori BPOM	Min 1 negara	Min 1 negara	1	100%	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Capaian indikator kinerja jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulasi BPOM adalah 1 negara dari 1 negara, sehingga capaian indikator adalah 100%.

Indikator jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM juga baru diukur pada tahun 2018. Indikator ini merupakan pengukuran efektivitas Kerja Sama Selatan-Selatan yang dilakukan BPOM yang termasuk dalam salah satu program prioritas nasional. Kerja Sama Selatan-Selatan tahun 2018 dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas untuk 3 kawasan, dengan melibatkan 4 negara. Pencapaian sasaran dinilai berdasarkan jumlah negara yang telah merujuk fungsi regulatori BPOM untuk penyusunan regulasi atau aturan pengawasan obat dan makanan di negaranya.

Capaian jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM sesuai target yang ditetapkan yaitu 100 dengan kategori Baik. Hal ini dikarenakan terdapat 1 negara yaitu Timor Leste yang merujuk fungsi regulatori BPOM di bidang Inspeksi dan Sertifikasi Pangan.

Kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian indikator jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM tahun 2018 antara lain:

- a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan materi peningkatan kapasitas.
- b. Peningkatan koordinasi Biro Kerja Sama melalui rapat koordinasi, komunikasi melalui telepon, e-mail dan *whatsapp group* baik dengan unit internal BPOM dan pihak mitra.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Upaya Biro Kerja Sama untuk meningkatkan jumlah negara selatan-selatan yang merujuk regulasi BPOM tahun 2019 terhadap keberhasilan pencapaian indikator dilakukan melalui:

1. Penyusunan Roadmap Kerja Sama Selatan-Selatan
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Selatan-Selatan

3. Menjajaki kerja sama dengan donor luar negeri dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular.

Sasaran 3	Meningkatnya Kerja Sama BPOM
IKU: 1. Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM 2. Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 2 (dua) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 11. Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kerja Sama BPOM

No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	71	70	70,3	100,5	100		67			66			63	
2	Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	91	91	91	100	100	31	31	100	28	28	100	25	25	100

*) Capaian Kerja Sama Luar Negeri

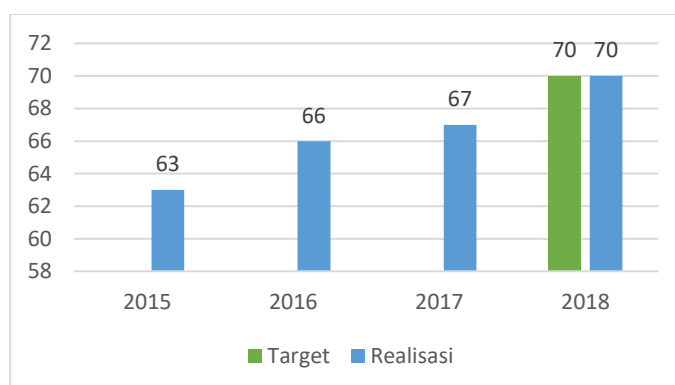
Indikator kinerja yang pertama adalah “Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM” adalah adalah 70,3 % dari target 70 % sehingga capaian indikator adalah 100,5 %.

Kerja sama yang dimaksud meliputi penjajakan kerja sama, penyusunan kesepakatan kerja sama, serta pelaksanaan kerja sama BPOM dengan mitra baik dalam negeri dan luar negeri. Kerja sama dalam negeri dilakukan melalui kemitraan dengan lintas sektor terkait antara lain kerja sama dengan kementerian/lembaga, akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi pelaku usaha, gerakan pramukan, dll. Kerja sama luar negeri dilaksanakan meliputi kerja sama dengan mitra luar negeri secara bilateral, maupun dalam forum regional, dan multilateral.

“**Meningkatnya Kerja Sama BPOM**” melalui fasilitasi dan koordinasi kerja sama BPOM yang dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama, berupa pelaksanaan kegiatan *capacity building* (workshop, seminar, desiminasi, *sharing experience/knowledge*, dll), kegiatan bersama (*joint inspection, joint assessment*, dll), penyusunan naskah dan dokumen kerja sama, rapat koordinasi, dll.

Jumlah kerja sama diukur berdasarkan capaian penyusunan naskah kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama dengan pihak mitra di dalam negeri dan luar negeri, posisi BPOM/Indonesia dalam forum kerja sama internasional, penyiapan bahan kerja sama, dll. Sedangkan efektivitas kerja sama diukur berdasarkan jumlah kerja sama yang telah diimplementasikan minimal 1 ruang lingkup.

Capaian indikator kinerja Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM, dihitung berdasarkan penilaian kerja sama yang efektif dibagi total kerja sama yang dimiliki oleh BPOM.



Gambar 7. Capaian Presentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti secara efektif

Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 70%, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2017 dengan capaian 67% secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena:

1. Dukungan regulasi dan penguatan kelembagaan BPOM, seperti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017, Peraturan Kepala BPOM Nomor 26 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018.
2. Meningkatnya koordinasi internal dan eksternal.
3. Sistem manajemen mutu Badan POM yang telah diimplementasikan dengan baik.
4. Tersedianya panduan penyiapan bahan kerja sama.

Indikator kinerja yang kedua adalah “jumlah dokumen kerja sama BPOM” adalah 91 dari target 91 sehingga capaian indikator adalah 100 % dengan kategori “BAIK”.

Cara perhitungan adalah jumlah kerja sama yang meliputi peninjauan kerja sama, penyusunan kesepakatan kerja sama, serta pelaksanaan kerja sama BPOM dengan mitra baik dalam negeri dan luar negeri. Kerja sama dalam negeri dilakukan melalui

kemitraan dengan lintas sektor terkait antara lain kerja sama dengan kementerian/lembaga, akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi pelaku usaha, gerakan pramukan, dll. Kerja sama luar negeri dilaksanakan meliputi kerja sama dengan mitra luar negeri secara bilateral, maupun dalam forum regional, dan multilateral.

Selama tahun 2018, BPOM telah melakukan kerja sama sebanyak 91 kerja sama yang terdiri dari:

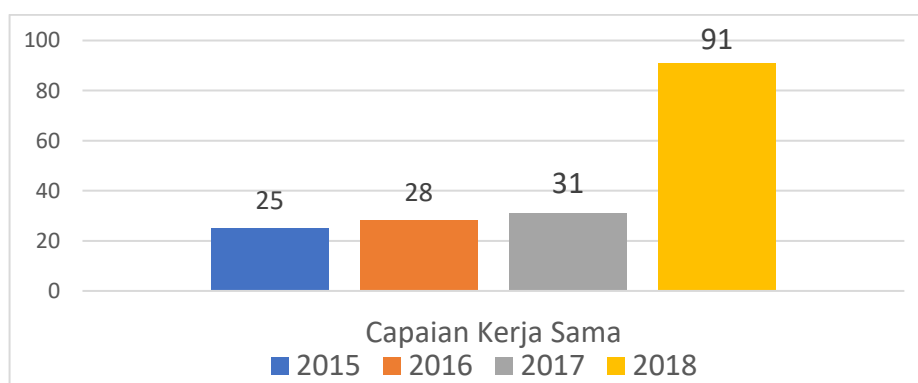
1. Kerja Sama Bilateral dan KSST sebanyak 14 (empat belas) kerja sama yang meliputi di 14 (empat belas) negara yaitu: Amerika Serikat, Australia, Cina, India, Korea, Arab Saudi, Jepang, Ukraina, Kazakhstan, EFTA, Palestina, Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL), Maroko dan Tunisia. dengan 14 (empat belas) instansi yaitu *US Food and Drug Administration (FDA)*, *US Pharmacopeia*, *Harvard Kennedy School (HKS)*, *Michigan State University (MSU)*, *Massachusetts Institute of Technology (MIT)*, *Therapeutic Good Administration (TGA)*, *General Administration of Custom of the PRC*, *State Administration of Traditional Chinese Medicine (SATCM)*, *Guangzhou Hospital of Traditional Chinese Medicine (TCM)*, *Food and Health Bureau of Hong Kong Special Administrative Region*, *Central Drugs Standard Control Organization (CDSCO)*, *Ministry of AYUSH*, *Ministry Food and Drug Safety (MFDS)*, *Saudi Food and Drug Administration (SFDA)*, *Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA)*, *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, *State Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control (SSUMDC)*, *National Center for Expertise of Medicines, Medical Devices and Medical Equipment (NCEMMDME)*.
2. Kerja Sama Regional Multilateral sebanyak 20 (dua puluh) dokumen kerja sama yang meliputi kerja sama pada forum (*Senior Economic Official Meeting*) SEOM, Cluster 4, *ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality-Traditional Medicine and Health Supplement Product Working Group (ACCSQ TMHS PWG)*, *ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality-Prepared Foodstuff Product Working Group (ACCSQ PFPWG)*, *ASEAN Consultative Committee on Standard and Quality-Pharmaceutical Product Working Group (ACCSQ PPWG)*, *ASEAN – China*, *ASEAN - Australia New Zealand*, *ASEAN – Korea*, *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, *Commission on Narcotic Drugs (CND)*, *Member State Mechanism on Substandard and Falsified Medical Product (MSM SFMP)*, *CODEX*, *International Coalition on Medicines Regulatory Authorities (ICMRA)*, *International Conference on Drug Regulatory Authorities (ICDRA)*, *Technical Barriers to Trade- World Trade Organization (TBT WTO)*, *Sanitary*

and Phytosanitary World Trade Organization (SPS WTO), Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights (TRIPS WTO), WTO Trade and Facilitation Agreement (TFA), Organization of Islamic Cooperation (OIC).

3. Kerja Sama Dalam Negeri sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kerja sama yang meliputi 41 kerja sama dengan instansi pemerintah dan 16 dengan mitra non pemerintah. Kerja Sama dengan instansi pemerintah meliputi kerja sama dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Kota serta perangkat daerah lainnya. Kerja Sama dengan mitra non pemerintah meliputi akademisi, asosiasi, organisasi masyarakat dan gerakan pramuka.

Jumlah dokumen kerja sama BPOM tahun 2018 sebanyak 91 dokumen meningkat dari tahun 2017 yang hanya memiliki target untuk kerja sama luar negeri sebanyak 34 dokumen kerja sama. Peningkatan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena:

1. Meningkatnya koordinasi dengan unit kerja, kementerian/Lembaga terkait serta pihak mitra lainnya.
2. Sistem manajemen mutu Badan POM yang telah diimplementasikan dengan baik.
3. Tersedianya panduan penyiapan bahan kerja sama dan penyusunan perjanjian kerja sama dalam dan luar negeri.
4. Meningkatnya permintaan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama yang bertujuan untuk mengakomodir kepentingan masing-masing negara dan dengan lintas sektor terkait di dalam negeri.



Gambar 8. Capaian Presentase Kerja Sama yang Ditindaklanjuti secara efektif

Upaya Peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan indikator tersebut di atas antara lain melakukan:

1. Pengembangan aplikasi *database* internal untuk memonitor progres layanan Biro Kerja Sama.
2. Peningkatan kompetensi SDM Biro Kerja Sama.
3. Sosialisasi pedoman dan roadmap kerja sama kepada unit kerja dan lintas sektor terkait.
4. Peningkatan koordinasi penyiapan bahan kunjungan kerja luar negeri dan dokumen posisi BPOM/Indonesia dalam forum bilateral, regional dan multilateral.

Sasaran 4	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
IKU:	
1. Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	
2. Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	

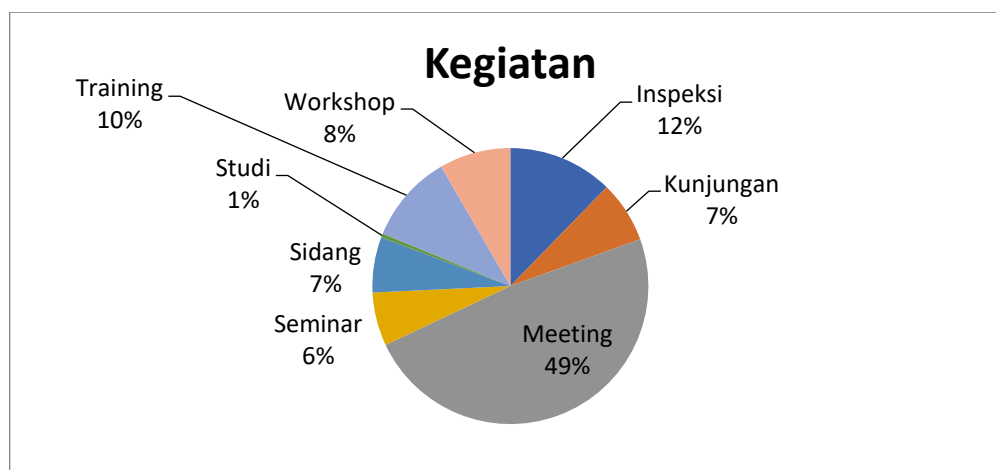
Tabel 12. Pencapaian Sasaran Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan

No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	95	95	100	100,5	100,5	95	95	100	95	95,03	100	95	95	100
2	Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	80	80	80,7	100,9	100,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja yang pertama adalah “Persentase kerja sama yang dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu” adalah adalah 100 % dari target 95 % sehingga capaian indikator adalah 100,5 %.

Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah dokumen perjalanan dinas yang selesai tepat waktu dengan pengajuan usulan perjalanan dinas yang sesuai dengan ketentuan. Yang dimaksud tepat waktu adalah dokumen perjalanan dinas dapat selesai paling lama 14 hari kerja dihitung setelah persyaratan lengkap dan telah disetujui pimpinan.

Pada tahun 2018, Biro Kerja Sama telah memfasilitasi 431 pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri ke 34 negara. Perjalanan dinas didominasi pada pertemuan (meeting) internasional (50%), selanjutnya adalah inspeksi (13%) dan peningkatan kompetensi atau training (11%).



Gambar 9. Jenis Kegiatan Perjalanan Dinas

Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu melebihi target yang ditentukan yaitu sebesar 100,5%, meningkat jika dibandingkan pada tahun 2017 dengan capaian 100% secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain karena:

1. Sosialisasi/surat edaran terkait perjalanan dinas luar negeri.
2. Pengajuan ke setneg via aplikasi dapat di akses 24 jam.
3. Sistem manajemen mutu Badan POM yang telah diimplementasikan dengan baik.

Indikator kinerja yang kedua adalah “Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu” adalah 80,7 % dari target 80 % sehingga capaian indikator adalah 100,9 %.

Cara perhitungan adalah jumlah kerja sama yang meliputi “Presentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu” meliputi Menghitung total jumlah kesepakatan bersama (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS) yang diselesaikan tepat waktu dibandingkan dengan waktu standard dalam SOP Makro.

$$\text{Nilai Presentasi} = \frac{\text{Jumlah MoU atau PKS yang tepat waktu}}{\text{Total Pengajuan Prnyusunan MoU atau PKS}}$$

Selama tahun 2018, Biro Kerja Sama telah memfasilitasi 57 penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dalam negeri BPOM dan 2 (dua) buah kesepakatan bersama dengan mitra di luar negeri.

Upaya Peningkatan tahun 2019 terhadap keberhasilan indikator tersebut di atas antara lain melakukan:

1. Pengembangan aplikasi *database* internal untuk memonitor progres layanan Biro Kerja Sama
2. Peningkatan kompetensi SDM Biro Kerja Sama
3. Sosialisasi pedoman dan roadmap kerja sama kepada unit kerja dan lintas sektor terkait

Sasaran 5	Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)
<p>IKU:</p> <p>Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan</p>	

Tabel 13. Pencapaian Sasaran Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)

No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	3	3	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Indikator kinerja “Jumlah kerja sama dan dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan” adalah adalah 3 kawasan dari target 3 kawasan sehingga capaian indikator adalah 100 %.

Jumlah kerja sama dan dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan dihitung berdasarkan jumlah kawasan yang mendapat dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST). Pelaksanaan kerja sama selatan-selatan dapat dalam bentuk workshop, training, seminar atau kegiatan *capacity building* lainnya yang melibatkan negara-negara di kawasan selatan-selatan.

Pada tahun 2018, Biro Kerja Sama telah memfasilitasi pelaksanaan kerja sama selatan-selatan untuk 4 negara di 3 kawasan, yaitu Timor Leste, Maroko, Tunisia dan Palestina. Kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian indikator Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan antara lain:

- a. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan materi peningkatan kapasitas.
- b. Peningkatan koordinasi Biro Kerja Sama melalui rapat koordinasi, komunikasi melalui telepon, e-mail dan *whatsapp group* baik dengan unit internal BPOM dan pihak mitra.
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait.

Upaya Biro Kerja Sama untuk meningkatkan Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan terhadap keberhasilan pencapaian indikator dilakukan melalui:

1. Penyusunan Roadmap Kerja Sama Selatan-Selatan
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Selatan-Selatan
3. Menjajaki kerja sama dengan donor luar negeri dalam kerangka Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular.

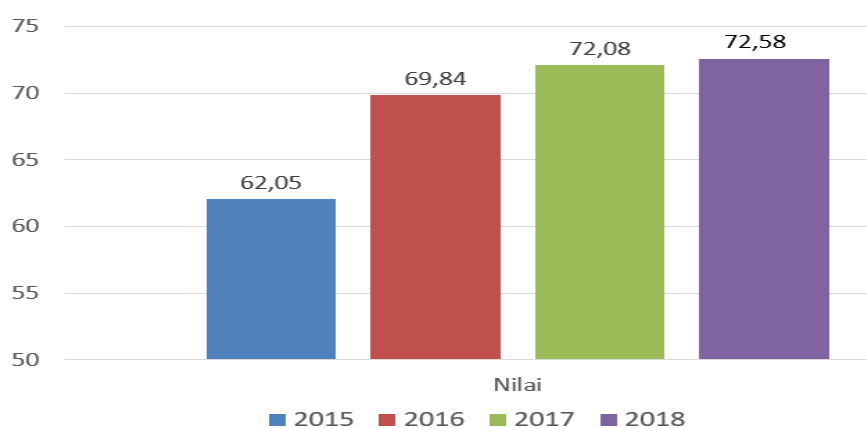
Sasaran 6	Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019
IKU: Nilai AKIP Biro Kerja Sama	

Tabel 14. Pencapaian Sasaran Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019

No	Indikator	2019	2018				2017			2016			2015		
		T	T	R	%	% C thd 2019	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	78	78	72,58	93,05	93,05	80	72,1	90	80	69,8	87	80	62	77,5

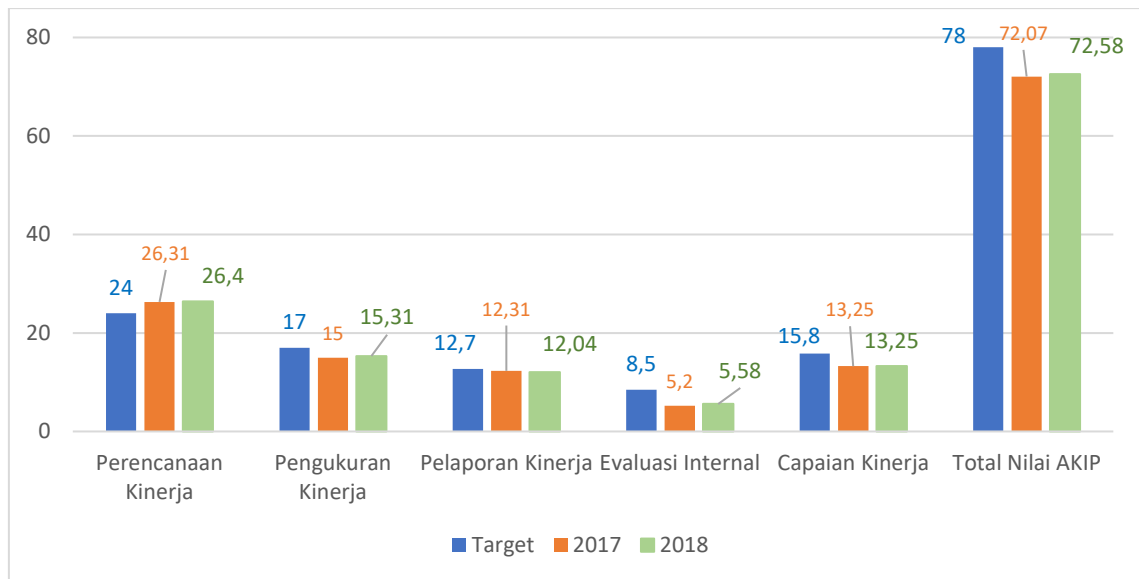
Indikator kinerja “Nilai AKIP Biro Kerja Sama” adalah 72,58 dari target 78 sehingga capaian indikator adalah 93,05 %.

Nilai AKIP Biro Kerja Sama diperoleh berdasarkan nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Biro Kerja Sama. Nilai AKIP Biro Kerja Sama adalah 72,58 (93,05 %) belum mencapai target yang ditentukan yaitu 78, namun menunjukkan trend meningkat sejak tahun 2015 s.d 2018, yaitu 62,05 (2015), 69,84 (2016), 72,08 (2017) dan 72,58 (2018).



Gambar 10. Penilaian AKIP Biro Kerja Sama 2015 - 2018

Penilaian AKIP oleh Inspektorat Utama berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 12 Tahun 2015 berdasarkan 5 komponen penilaian yaitu Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25%), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), dan Pencapaian Kinerja (20%). Berdasarkan hasil penilaian AKIP tersebut, menunjukkan trend meningkat di hampir semua komponen kecuali pelaporan kinerja yang turun 0,27 poin.



Gambar 11. Perbandingan Nilai AKIP Biro Kerja Sama 2017 dan 2018

Hasil Penilaian AKIP Tahun 2018 tersebut, Biro Kerja Sama dinilai memiliki akuntabilitas yang baik, berkinerja sangat baik serta memiliki kinerja yang andal, hal ini dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

- a. Perencanaan: Biro Kerja Sama telah memiliki dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis (Renstra) secara berkala, yang menyajikan indikator kinerja utama (IKU) 2015-2019 sebagai tolak ukur kinerja secara formal sesuai dengan perubahan organisasi;
- b. Pengukuran Kinerja: Biro Kerja Sama telah menyusun *cascading* indikator kinerja sampai tingkat individu pegawai;
- c. Pelaporan Kinerja: Biro Kerja Sama telah menyajikan informasi kinerja yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja.
- d. Evaluasi Kinerja: Biro Kerja Sama telah melakukan evaluasi internal, namun belum memanfaatkan hasil evaluasi internal secara optimal untuk umpan balik bagi penyempurnaan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja.
- e. Capaian Kinerja: Biro Kerja Sama telah mencapai sasaran kinerja utama untuk meningkatkan kerja sama BPOM, tetapi terdapat indikator yang masih di bawah target.

Selama tahun 2018, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator ini yaitu:

- a. Melakukan revisi renstra Biro Kerja Sama Tahun 2015-2019 sesuai dengan perubahan organisasi dan dinamika lingkungan strategis.

- b. Menyusun rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja dan Laporan Kinerja Biro Kerja Sama;
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dan anggaran Biro Kerja Sama;
- d. Menyusun sasaran strategis dan indikator kinerja sesuai dengan perubahan organisasi;
- e. Menyusun Laporan Kinerja Biro Kerja Sama.

Upaya Biro Kerja Sama untuk meningkatkan keberhasilan indikator tersebut pada tahun 2019 yaitu:

1. Melakukan reviu renstra secara berkala;
2. Menyempurnakan penyajian informasi perihal pengukuran kinerja melalui penguruan data kinerja yang sistematis dan mampu telusur berbasis teknologi informasi;
3. Melakukan evaluasi internal secara berkala;
4. Melaksanakan dan mendokumentasikan monitoring pencapaian rencana aksi dalam mengendalikan kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 oleh Inspektorat I, Inspektorat Utama, BPOM, ada beberapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti oleh Biro Kerja Sama, antara lain:

1. Penetapan Keputusan Kepala Biro Kerja Sama tentang Penetapan indikator Kinerja Utama 2015-2019;
2. Pengumpulan dan pengukuran capaian data kinerja dimonitoring dan dievaluasi melalui pertemuan setiap triwulan;
3. Pada tahun 2018, sejalan dengan perubahan organisasi dan tata laksana BPOM, mayoritas indikator merupakan indikator baru, sehingga capaian kinerja yang disajikan akan menjadi umpan balik untuk penetapan target tahun berikutnya terutama untuk indikator yang belum tercapai.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2018, pagu anggaran Biro Kerja Sama sebesar Rp.8.225.900.000,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.7.223.880.286,- (87,81%), dengan rincian, sebagai berikut:

Tabel 15. Realisasi Anggaran Biro Kerja Sama tahun 2018

No	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	6.714.800.000	5.811.623.499	86,55
2	Penguatan Fungsi Regulatori Pengawasan Obat dan Makanan di Negara Selatan-Selatan	999.100.000	960.261.686	96,11
3	Layanan Internal	512.000.000	499.000.171	97,46
	Total	8.225.900.000	7.223.880.286	87,81

Adapun realisasi perkomponen anggaran sebagaimana Tabel 16.

Tabel 16. Realisasi Anggaran Biro Kerja Sama Per Komponen tahun 2018

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
001	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM	6.714.800.000	5.811.623.499	903.176.500	87%
1	Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Bilateral	2.033.078.000	1.606.226.095	426.851.905	79%
2	Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Regional dan Multilateral	2.085.453.000	1.716.607.117	368.845.883	82%
3	Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Dalam Negeri	1.111.930.000	1.040.080.811	71.849.189	93%
4	Operasional Kerja Sama	1.484.339.000	1.401.704.406	82.634.594	94%
002	Penguatan Fungsi Regulatori Pengawasan	999.100.000	960.261.686	38.838.314	96%

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	%
	Obat dan Makanan di Negara Selatan-Selatan				
1	Penyelenggaraan Kerja Sama dengan Timor Leste	431.055.000	425.259.910	5.795.000	96%
2	Penyelenggaraan Kerja Sama dengan Negara Anggota OKI	545.560.000	516.410.926	29.149.000	96%
3	Penyelenggaraan Kerja Sama dengan Negara Mitra Asia/Afrika	22.485.000	22.270.350	2.146.000	96%
007	Peralatan dan Mesin	512.000.000	499.000.171	12.999.829	97%
	TOTAL ANGGARAN	8.225.900.000	7.223.880.286	1.002.019.714	88%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran program “Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM” yaitu sebesar 81,63%. Hal ini karena tugas dan fungsi Biro Kerja Sama adalah melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri di bidang pengawasan obat dan makanan.

Realisasi yang kurang optimal pada kegiatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama, karena terdapat perjalanan dinas luar negeri yang sedianya akan dilaksanakan, namun tidak terealisasi, mengingat padatannya agenda internal BPOM. Pada tahun 2018, BPOM menjadi tuan rumah Pertemuan Pertama Kepala Badan Otoritas Pengawas Obat Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada tanggal 20-23 November 2018. Biro Kerja Sama adalah koordinator dan fasilitator persiapan dan tim persidangan pertemuan tersebut, yang memfasilitasi komunikasi dan koordinasi dengan pihak eksternal terkait (Kementerian Luar Negeri, Setkab, Sekretariat OKI, Kedutaan Besar Negara-negara anggota OKI di Jakarta, Perwakilan RI di negara-negara anggota OKI, dll). Rangkaian proses persiapan dimulai dari awal tahun sampai dengan tanggal penyelenggaraan, yang dikoordinasikan Biro Kerja Sama bersifat *time-consuming*.

Selain itu, kegiatan besar lainnya yang cukup menyita waktu adalah Program Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS), yang dilaksanakan untuk pertama kalinya di bawah koordinasi Biro Kerja Sama sebagai implikasi dari berlakunya SOTK baru. Berdasarkan SOTK tersebut, Biro Kerja Sama diberikan tanggung jawab mengelola Kerja Sama Selatan-Selatan BPOM di bawah prioritas nasional. Pelaksanaan KSS

dengan sejumlah negara yaitu Timor-Leste, Palestina, Maroko dan Tunisia memerlukan persiapan khusus.

Upaya yang dilakukan agar realisasi anggaran lebih optimal, antara lain:

1. Menyusun *Plan of Action* (PoA) pada awal tahun anggaran dan dipatuhi pada pelaksanaannya.
2. Melakukan monitoring berkala secara lebih ketat atas pencapaian kinerja dan realisasi anggaran kegiatan sesuai sasaran pada Perjanjian Kinerja.
3. Melaksanakan koordinasi lintas unit dan sektor untuk mengidentifikasi peluang, tantangan dan kesempatan untuk membangun kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan yang menjadi tugas dan fungsi utama BPOM, yang dilaksanakan oleh Biro Kerja Sama.

D. ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi kegiatan adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama, atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang lebih besar, atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Dengan demikian, fokus perhatian dalam pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan.

Efisiensi suatu kegiatan dapat disimpulkan setelah membandingkan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE). Indeks Efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % Capaian Output terhadap % Capaian Input sebagaimana rumus di bawah ini :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan Standar Efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Angka ini bisa berupa angka capaian efisiensi tahun lalu, angka capaian efisiensi instansi lain untuk kegiatan yang sama, atau angka capaian efisiensi sesuai dengan rencana capaian target, dan sebagainya.

Dalam laporan ini SE yang digunakan adalah *angka capaian efisiensi* sesuai dengan rencana capaian/target yaitu 1, yang diperoleh dengan memakai rumus di bawah ini:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Output}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

IE kemudian dibandingkan dengan SE dan kategori penilaian diberikan dengan cara sebagai berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur. Tingkat Efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Inefisiensi dapat menyebabkan pemborosan/kerugian negara, tetapi tidak selalu demikian. Ada juga inefisiensi yang tidak mengakibatkan terjadinya pemborosan/kerugian negara antara lain :

- Jika input kegiatan bukan dana, melainkan hanya SDM atau metode peralatan dan sebagainya.
- Realisasi input melebihi anggaran atau output lebih rendah dari targetnya akibat kenaikan harga yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari 6 (enam) sasaran program yang ditetapkan dalam Renstra Biro Kerja Sama Tahun 2015-2019, terdapat 2 (dua) sasaran program dengan kategori “Memuaskan”, 3 (tiga) sasaran program dengan kategori “Baik”, 1 (satu) sasaran program dengan kategori “Cukup”.
2. Sasaran program dengan kategori “Cukup” yaitu Terwujudnya Reformasi Birokrasi dengan Nilai AKIP sebesar 72,58. Namun demikian, nilai AKIP Biro Kerja Sama menunjukkan trend meningkat walau masih dalam kategori BAIK (BB).
3. Hasil capaian kinerja secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan masih dalam kategori “Baik”. Meskipun demikian, pencapaian target indikator kinerja Biro Kerja Sama memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif unit kerja teknis terkait.
4. Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Biro Kerja Sama bagi peningkatan kinerja dimasa datang antara lain adalah:
 - a. Pengkajian potensi kerja sama luar negeri dengan negara-negara mitra maupun kerja sama dalam lingkup yang lebih besar seperti regional dan multilateral.
 - b. Penyesuaian pencapaian sasaran yang ada dalam Renstra dengan QMS, peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, terpenuhinya sarana prasarana dan pemberdayaan SDM sehingga tercapai profesionalitas kerja secara dinamis.
 - c. Penyusunan sistem informasi hubungan dan kerja sama luar negeri Badan POM untuk membangun *instution knowledge* sehingga pejabat yang berkepentingan dapat memperoleh informasi data kerja sama yang komprehensif dan terkini. Hal ini penting dalam menyusun posisi kerja sama dan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan Badan POM khususnya dalam membangun kemitraan dan jejaring kerja sama dengan stakeholder terkait.
 - d. Peningkatan pengelolaan *Human Capital Management* (HCM) di Biro KSLN dalam membuat perencanaan dengan melibatkan semua SDM yang ada
 - e. Peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi (RB), *Quality Management System* (QMS), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

B. Saran

1. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersediadisa kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran.
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka perlu memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
3. Menjadikan SAKIP sebagai ukuran kinerja organisasi pemerintah secara nyata dan akuntabel, dengan menerapkan fungsi reward and punishment yang tegas dan ketat.
4. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan koordinasi penyiapan bahan kunjungan kerja luar negeri dan dokumen posisi BPOM/Indonesia dalam forum bilateral, regional dan multilateral.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Biro Kerja Sama Tahun 2018 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholder, sekaligus dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa mendatang.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.

RENCANA STRATEGIS BIRO KERJA SAMA TAHUN 2015 – 2019

Sasaran Program	Indikator	Target Kinerja	
		2018	2019
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	75	80
Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM	Min 1 negara	Min 1 negara
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu	95 %	95 %
	Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	80 %	80 %
Meningkatnya Kerja Sama BPOM	Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	91	91
	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	70 %	71 %
Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	3	3
Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	78	78

LAMPIRAN 2.

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO KERJA SAMA



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA
BADAN POM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.04.1.23.02.19.0200 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015 - 2019
DI LINGKUNGAN BIRO KERJA SAMA

KEPALA BIRO KERJA SAMA

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat penyesuaian Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Biro Kerja Sama;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Kerja Sama tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 – 2019 di Lingkungan Biro Kerja Sama;
- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 784);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BIRO KERJA SAMA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN BIRO KERJA SAMA
- Kesatu : Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Kerja Sama, Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah indikator untuk mengukur capaian keberhasilan program dan

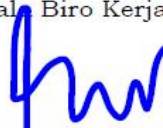
kegiatan yang akan dilaksanakan di Biro Kerja Sama yang berkontribusi terhadap IKU Sekretariat Utama dalam rangka peningkatan kerjasama lintas sektor yang efektif;

Kedua : Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Kerja Sama, Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2019

Kepala Biro Kerja Sama



Diana ES Sutikno

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
2. Seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
3. Kepala Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

Lampiran 1.

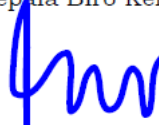
INDIKATOR KINERJA UTAMA BIRO KERJA SAMA

1. Nama Organisasi : BIRO KERJA SAMA
2. Tugas : Melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Obat dan Makanan
3. Fungsi :
 - a. Penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan - selatan, triangular, regional, dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
 - b. Penyiapan koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama dalam negeri dan kerja sama luar negeri bilateral, selatan-selatan, triangular, regional dan multilateral di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- 4 Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama
2	Meningkatnya kerja sama BPOM	Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM
		Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM
	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu
3	Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Jumlah negara selatan-selatan yang merujuk fungsi regulatori BPOM
4	Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan
5	Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015 - 2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama

Kepala Biro Kerja Sama



Diana ES Sutikno

LAMPIRAN 3.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana ES Sutikno, S.IP, M.Si, LLM
Jabatan : Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt, MP
Jabatan : Sekretaris Utama

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua

Dra. Elin Herlina, Apt, MP
NIP. 19670418 199203 2 001

Pihak Pertama

Diana ES Sutikno, S.IP., M.Si., LLM
NIP. 19710405 199903 2 010



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 BIRO KERJA SAMA Periode Maret – Juli 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya hubungan kerja sama yang sejalan dengan kepentingan nasional di bidang obat dan makanan baik di dalam dan luar negeri	Persentase kerja sama di bidang obat dan makanan yang ditindaklanjuti secara efektif	70%
2.	Kerja sama yang difasilitasi	Jumlah kerja sama yang difasilitasi	91
3.	Dihasilkannya penguatan fungsi regulatori pengawasan obat dan makanan di negara-negara selatan	Jumlah kerja sama dan dukungan bantuan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang Obat dan Makanan	3
4.	Layanan internal (overhead)		1

Kegiatan:
Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan
Kerja Sama Badan POM

Anggaran
Rp 8.225.900.000,-

Pihak Kedua

Dra. Elin Herlina, Apt, MP
NIP. 19670418 199203 2 001

Jakarta,
Pihak Pertama

Dr. Diana ES Sutikno, S.IP., M.Si., LLM
NIP. 19710405 199903 2 010

2018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 BIRO KERJA SAMA
 Periode Agustus – Desember 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya hubungan kerja sama yang sejalan dengan kepentingan nasional di bidang obat dan makanan baik di dalam dan luar negeri	Persentase kerja sama di bidang obat dan makanan yang ditindaklanjuti secara efektif	70%
2.	Kerja sama yang difasilitasi	Jumlah kerja sama yang difasilitasi	91
3.	Dihasilkannya penguatan fungsi regulatori pengawasan obat dan makanan di negara-negara selatan	Jumlah kerja sama dan dukungan bantuan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang Obat dan Makanan	3
4.	Layanan internal (overhead)		1

Kegiatan:
 Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM

Anggaran
 Rp 8.225.900.000,-

Pihak Kedua



Dra. Elin Herlina, Apt, MP
 NIP. 19670418 199203 2 001

Jakarta,
 Pihak Pertama

2018



Diana ES Sutikno, S.IP., M.Si., LL.M.
 NIP. 19710405 199903 2 010



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139

Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diana ES Sutikno

Jabatan : Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

Jabatan : Sekretaris Utama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, Januari 2018
Pihak Pertama

Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

Diana ES Sutikno

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Dokumen pengembangan kerjasama luar negeri di bidang obat dan makanan	34 Dokumen

Kegiatan

Anggaran

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM | Rp. 7.225.900.000,- |
|--|---------------------|

Sekretaris Utama



Dra. Reri Indriani, Apt, M.Si

Jakarta, Januari 2018
Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri



Diana ES Sutikno

LAMPIRAN 4.

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

FORMULIR RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET				REALISASI				KETERANGAN
		URAIAN	SATUAN	B3	B6	B9	B12	B3	B6	B9	B12	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)
1	Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama Badan POM	Dokumen pengembangan kerjasama luar negeri di bidang obat dan makanan	34 Dokumen	7	14	26	34					

LAMPIRAN 5.

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

Unit Kerja: Biro Kerja Sama

Tahun Anggaran: 2018

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	Operasional Biro Kerja Sama	Input: Dana	Rp	1.013.190.000	905.219.659	89,34
2.	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu		Pedoman/Roadmap Kerja Sama Badan POM	Output: Jumlah laporan operasional Biro Kerja Sama selama 12 (dua belas) bulan	Laporan	1	1
		Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	Kick off meeting dlm rangka KSS		Input: Dana	Rp	201.653.000	173.375.887
				Output: Jumlah dokumen kerja sama yang dihasilkan	Dokumen	1	1	100
3.	Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional	Indeks kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan	Workshop dlm rangka Capacity Building untuk Timor Leste	Input: Dana	Rp	9.136.000	3.428.000	37,52
4	Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)	Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di		Output: Kegiatan KSS yang telah dilaksanakan	Kegiatan	1	1	100
			Input: Dana	Rp	421.919.000	421.831.910	99,98	
				Output: Kegiatan Capacity Building yang telah dilaksanakan	Kegiatan	1	1	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
		bidang obat dan makanan	Workshop Peningkatan Kapasitas Regulatori Palestina	Input:					
				Dana	Rp	545.560.000	504.186.366	92,42	
				Output:					
				Kegiatan workshop yang telah diselenggarakan bagi Regulator dari Palestina	Kegiatan	1	1	100	
			Workshop Peningkatan Kapasitas Regulatori di negara berkembang di kawasan	Workshop Peningkatan Kapasitas Regulatori di negara berkembang di kawasan	Input:				
					Dana	Rp	22.485.000	22.270.350	99,05
					Output:				
					Kegiatan workshop yang telah diselenggarakan di negara berkembang di kawasan	Kegiatan	1	1	100
			Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerjasama Regional	Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerjasama Regional	Input:				
					Dana	Rp	248.075.000	219.466.227	88,47
					Output:				
					Kegiatan workshop/seminar/sosialisasi Isu-isu Kerjasama Regional	Kegiatan	2	2	100
5.	Meningkatnya Kerja Sama BPOM	Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	Penyusunan Kajian Kerja Sama Dalam Negeri	Input:					
				Dana	Rp	44.870.000	36.923.300	82,29	
				Output:					
				Jumlah kajian yang dihasilkan	Kajian	2	2	100	
			Penjajakan Kerjasama dengan Mitra di Luar Negeri	Penjajakan Kerjasama dengan Mitra di Luar Negeri	Input:				
					Dana	Rp	269.551.000	211.549.862	78,48
					Output:				
					Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	3	3	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	
			Penyusunan Posisi Badan POM dalam Kerjasama Bilateral	Input:					
				Dana	Rp	26.350.000	26.087.350	99	
				Output:					
				Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	12	12	100	
			Penyusunan Posisi Badan POM dalam Kerjasama Regional	Input:					
				Dana	Rp	61.250.000	44.325.908	72,37	
				Output:					
				Jumlah laporan yang dihasilkan	Laporan	35	35	100	
			Penyusunan Kajian Kerjasama Regional	Input:					
				Dana	Rp	102.080.000	71.280.350	69,83	
				Output:					
				Jumlah kajian yang dihasilkan	Kajian	2	2	100	
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	Workshop Strategi Penyusunan MoU Dalam Negeri	Input:					
				Dana	Rp	360.865.000	360.416.509	99,88	
				Output:					
				Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan	Kegiatan	1	1	100	
				Penyusunan Kajian Kerjasama Bilateral	Input:				
					Dana	Rp	12.282.000	11.973.000	97
					Output:				
					Jumlah kajian yang telah dibuat	Kajian	2	2	100
			Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerjasama Bilateral dan Multilateral	Input:					
				Dana	Rp	263.875.000	176.805.688	67	
				Output:					

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
				Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan	Kegiatan	2	2	100
			Drug and Food Control Newsletter	Input:				
				Dana	Rp	111.420.000	10.869.775	9,76
				Output:				
				Jumlah edisi newsletter yang dibuat	Edisi			
			Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	Input:				
				Dana	Rp	1.461.020.000	1.108.143.519	75,85
				Output:				
			Dukungan Pertemuan Head of NDRA Negara OKI	Input:				
				Dana	Rp	491.630.000	388.567.300	79,04
				Output:				
				Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan	Kegiatan	2	2	100
			Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional di Dalam dan Luar Negeri	Input:				
				Dana	Rp	1.070.998.000	916.732.557	85,60
				Output:				
				Jumlah Perjalanan yang telah diselenggarakan	Trip	19	19	100
			Koordinasi Lintas Sektor dlm rangka Monitoring dan Evaluasi MoU Dalam Negeri	Input:				
				Dana	Rp	504.542.000	408.642.609	80,99
				Output:				
				Jumlah perjalanan yang telah diselenggarakan	Trip	13	13	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%
6.	Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	Peningkatan Kompetensi Biro KS	Input:				
				Dana	Rp	147.600.000	77.686.980	52,63
				Output:				
			Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Biro KS	Jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan kinerja	OK	28	28	100
				Input:				
				Dana	Rp	323.549.000	278.191.405	85,98
			Pengadaan Fasilitas Perkantoran	Output:				
				Jumlah laporan yang dihasilkan	Laporan	3	3	100
				Input:				
			Alat Pengolah Data Biro Kerjasama Luar Negeri	Dana	Rp	260.700.000	249.212.671	95,59
				Output:				
				Jumlah laporan yang dihasilkan	Unit	8	8	100
			Alat Pengolah Data Biro Kerjasama Luar Negeri	Input:				
Dana	Rp	251.300.000		249.787.500	99,40			
Output:								
Jumlah laporan yang dihasilkan	Unit	14	14	100				

LAMPIRAN 6.

PENGUKURAN KINERJA SUB KEGIATAN TAHUN 2018

Sasaran Program	Indikator	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Input	Output	IE	SE	KATEGORI	TE	KATEGORI
Meningkatnya kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama	Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen	Operasional Biro Kerja Sama	89,34%	100%	1,12	1	Efisien	0,12	Efisien
Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi hubungan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan	Persentase dokumen perjalanan dinas luar negeri yang diselesaikan tepat waktu								
	Persentase naskah kerja sama yang diselesaikan tepat waktu	Pedoman/Roadmap Kerja Sama Badan POM	85,98%	100 %	1,16	1	Efisien	0,16	Efisien
1. Menguatnya kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan untuk mendukung pembangunan nasional 2. Terselenggaranya dukungan penguatan regulatori di bidang obat dan makanan dalam skema Kerja	1. Indeks kontribusi BPOM pada fungsi regulatori di negara selatan-selatan 2. Jumlah Kerja Sama dan Dukungan Indonesia terhadap negara berkembang di bawah skema kerja sama selatan-selatan dan triangular (KSST) di bidang obat dan makanan	Kick off meeting dlm rangka KSS	37,52%	100%	2,66	1	Efisien	1,66	Efisien
		Workshop dlm rangka Capacity Building untuk Timor Leste	99,98%	100%	1	1	Efisien	0	Efisien
		Workshop Peningkatan Kapasitas Regulatori Palestina	92,42%	100%	1.08	1	Efisien	0,08	Efisien
		Workshop Peningkatan Kapasitas Regulatori di	99,05%	100%	1.01	1	Efisien	0.01	Efisien

Sama Selatan-selatan dan Triangular (KSST)		negara berkembang di kawasan								
		Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerjasama Regional	88,47%	100%	1,13	1		0,13	Efisien	
Meningkatnya Kerja Sama BPOM	Jumlah dokumen Kerja Sama BPOM	Penyusunan Kajian Kerja Sama Dalam Negeri	82,29%	100%	1,21	1	Efisien	0,21	Efisien	
		Penjajakan Kerjasama dengan Mitra di Luar Negeri	78,48%	100%	1,27	1	Efisien	0,27	Efisien	
		Penyusunan Posisi Badan POM dalam Kerjasama Bilateral	99%	100%	1,01	1	Efisien	0,01	Efisien	
		Penyusunan Posisi Badan POM dalam Kerjasama Regional	72,37%	100%	1,38	1	Efisien	0,38	Efisien	
		Penyusunan Kajian Kerjasama Regional	69,83%	100%	1,42	1	Efisien	0,42	Efisien	
		Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti secara efektif terhadap total kerja sama BPOM	Workshop Strategi Penyusunan MoU Dalam Negeri	99,88%	100%	1	1	Efisien	0	Efisien
			Penyusunan Kajian Kerjasama Bilateral	97%	100%	1,03	1	Efisien	0,3	Efisien

		Workshop/Seminar/Sosialisasi Isu-Isu Kerjasama Bilateral dan Multilateral	67%	100%	1,49	1	Efisien	0,49	Efisien
		Drug and Food Control Newsletter	9,67%	10%	1,03	1	Efisien	0,03	Efisien
		Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Bilateral dengan Mitra di Dalam dan Luar Negeri	75,85%	100%	1,31	1	Efisien	0,31	Efisien
		Dukungan Pertemuan Head of NDRA Negara OKI	79,04%	100%	1,26	1	Efisien	0,26	Efisien
		Keikutsertaan dalam Pertemuan Interkementerian dan Pertemuan Regional di Dalam dan Luar Negeri	85,60%	100%	1,16	1	Efisien	0,16	Efisien
		Koordinasi Lintas Sektor dlm rangka Monitoring dan Evaluasi MoU Dalam Negeri	80,99%	100%	1,23	1	Efisien	0,23	Efisien
Terwujudnya RB Biro Kerja Sama 2015-2019	Nilai AKIP Biro Kerja Sama	Peningkatan Kompetensi Biro KS	52,63%	100%	1,90	1	Efisien	0,90	Efisien
		Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Biro KS	85,98%	100%	1,16	1	Efisien	0,16	Efisien

		Pengadaan Fasilitas Perkantoran	95,59%	100%	1.05	1	Efisien	0,05	Efisien
		Alat Pengolah Data Biro Kerjasama Luar Negeri	99,40	100%	1.01	1	Efisien	0,01	Efisien



LAMPIRAN 4.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018